

Pemerintah Kota Dumai
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



RENCANA STRATEGIS RENSTRA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA DUMAI



TAHUN 2021 - 2026
(REVISI)

www.diskpp.dumaikota.go.id



Jln. Dermaga No.08 Kel. Purnama - Dumai



KATA PENGANTAR

Seiring dengan semangat untuk mewujudkan penyelenggaraan good governance, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai menyusun perubahan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran teknis operasional dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Perubahan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai 2021-2026 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan pertanian di Kota Dumai selama lima tahun ke depan dan dijadikan sebagai tolok ukur bagi pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan pertanian di Kota Dumai.

Kami menyadari bahwa Perubahan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai 2021-2026 yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih banyak keterbatasan dalam menyikapi permasalahan dan isu strategis yang berkembang. Harapan kami adanya sumbang saran dan pendapat yang membangun selalu kami natikan.

Dumai, 07 Februari 2024

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA DUMAI,



MUKHLIS SUZANTRI, S.Hut.T, M.T.
Pembina Tk.I,
NIP. 19750313 199403 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		I-1
B. Landasan Hukum	I-2
C. Maksud dan Tujuan	I-5
D. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
B. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-10
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-12
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-16
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	I-1
B. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
C. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Propinsi	III-4
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-6
E. Penentuan Isi-Isu Strategi	III-8

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	V-1
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
A. Strategi	V-1
B. Kebijakan	V-1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
A. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	VI-1
B. Rencana Pendanaan	VI-6
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VII. PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.B.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2021.....	I-10
Tabel 2.B 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	II-11
Tabel 2.B.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang/Jurusan Pendidikan Tahun 2021	II-11
Tabel 2.B.4. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai Tahun 2021	II-12
Tabel 2.C.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai Tahun 2017-2020	II-14
Tabel 2.D.1. Sasaran Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2026	II-17
Tabel 2.D 2. Sasaran Peningkatan Produktifitas Tanaman Padi Tahun 2026	II-17
Tabel 2.D.3. Sasaran Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan 2026	II-17
Tabel 2.D.4. Sasaran Peningkatan Populasi Ternak 2026	II-18
Tabel 2.D.5. Sasaran Penurunan Kasus Penyakit Hewan menular 2026 ...	II-18
Tabel 4.B.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah dan IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021- 2026	IV-3
Tabel 6.B.1. Pagu Indikatif Pendanaan Renstra DKPP Kota Dumai Tahun 2021-2026	VI-7
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas DKPP Kota Dumai yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026	VII-4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Renstra Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021-2026 dilatarbelakangi untuk menjalankan amanat yang ditetapkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Adapun penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

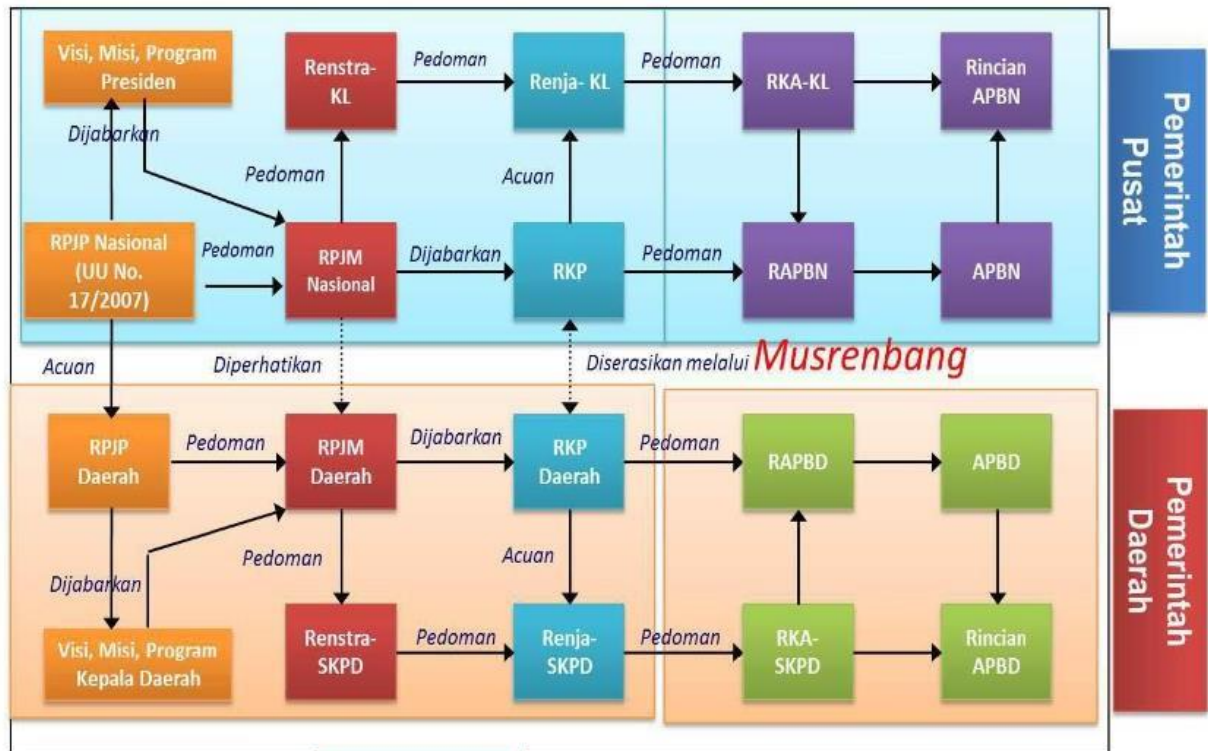
Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Permendagri No 86 tahun 2017 disebutkan bahwa terdapat tahap tahap dalam penyusunan Renstra, yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Persiapan yang dimaksud meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD;
2. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan RPJMD. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

- 3) Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - 4) Tujuan dan Sasaran;
 - 5) Strategi dan Arah Kebijakan;
 - 6) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - 7) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - 8) Penutup.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum ini dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra PD.
 5. Perumusan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Rancangan Renstra PD merupakan penyempurnaan Rancangan Renstra PD.
 6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kepala daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimana sasaran kota menjadi tujuan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keberadaan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai . Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana RAPBD juga harus berpedoman pada RKPD Kota Dumai, yang kemudian RAPBD disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gambaran tentang hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan 1.3.

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.



B. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
15. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
16. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

17. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
32. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021-2026;
34. Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai.

C. Maksud Dan Tujuan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah daerah di jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai beserta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan kesehatan hewan, sub sektor ketahanan pangan dan sub sektor penyuluhan di Kota Dumai. Disamping itu juga renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai selama lima tahun kedepan. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai arahan strategis

pelaksanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai guna mewujudkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dalam menentukan program prioritas dan kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana APBD Kota Dumai dan sumber dana lainnya.
2. Menyediakan pedoman bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dalam menyusun kegiatan beserta tolak ukur kinerja yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah, beserta potensi, peluang dan tantangan dalam konstelasi menyelaraskan dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai guna mendukung Visi-Misi Pemerintah Kota Dumai.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dan pihak lain yang terkait dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dan pihak lain yang terkait untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional yang disusun secara tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021-2026, meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai.
2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, menjelaskan tentang peran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumberdaya perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran perangkat daerah melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah sebelumnya, capaian kinerja antara renstra perangkat

daerah dengan RPJMD periode sebelumnya serta hambatan dan permasalahan perangkat daerah yang perlu diantisipasi.

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah sebagai dasar perumusan isu strategis, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra K/L dan renstra terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dan serta penentuan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.
4. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN yang menjelaskan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, pada bagian ini juga dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.
5. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai selama lima tahun yang akan datang.
6. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, dalam bagian ini diuraikan mengenai program dan kegiatan perangkat daerah, disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
7. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai.
8. BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai memiliki 1 sekretariat dan 6 bidang yaitu Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Bidang Penyuluhan. Struktur tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, dan dijabarkan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai.

Sebagai instansi teknis yang membidangi Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Penyuluhan maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai memiliki tugas yang cukup banyak. Sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang ketahanan pangan, bidang pertanian, subbidang urusan peternakan dan subbidang urusan Perkebunan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis penyusunan perencanaan dan program pembangunan dibidang ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan penyuluhan

2. Pembinaan dan pengendalian ketatausahaan, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan serta evaluasi pengawasan dan pelaporan.
3. Pemberian perizinan dan/atau rekomendasi pelaksanaan pelayanan umum dalam lingkup tugasnya.
4. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraanaktifitas bidang ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan penyuluhan.
5. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
6. Persiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2022 tersebut khususnya pada Bab III Pasal 3 bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala
 - a. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
 - b. Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundang-undangan, pengelolaan barang milik negara, dan Kerumahtanggan. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
- f. Penataan organisasi dan tata laksana.
- g. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
- h. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretariat dibantu oleh ; (1) Subbagian Perencanaan; (2) Subbagian Tata Usaha; dan (3) Subbagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan, menyelenggarakan dan menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan bimbingan dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan. Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, konsep kerja sama, pembinaan, dan pengendalian bidang ketahanan pangan;
- b. Penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan;

- c. Penyiapan bahan analisis dan evaluasi ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, mutu dan keamanan pangan, serta kewaspadaan pangan dan gizi;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sistem distribusi dan harga pangan yang efisien, merata, dan terjangkau;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan dalam rangka penganekaragaman pangan;
- f. Penyiapan bahan pengkajian pengembangan pangan lokal;
- g. Penyiapan bahan pengawasan terhadap pengolahan dan peredaran pangan;
- h. Penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
- i. Penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan pengelolaan pangan dan partisipasi masyarakat;
- j. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan Ketahanan Pangan;
- k. Penyiapan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pengadaan bibit, pengkajian teknologi, pemanfaatan aplikasi teknologi tanaman pangan dan hortikultura, sarana prasarana produksi dan mekanisasi, pengawasan dan pengendalian, serta perlindungan tanaman. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengkajian, pengembangan dan pengendalian produksi tanaman pangan dan hortikultura;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengkajian, pengembangan sarana prasarana, pengawasan serta perlindungan tanaman;
- c. Penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan perbenihan dan perbibitan;
- d. Penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan aplikasi teknologi;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan pemanfaatan sumberdaya pertanian;
- f. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan pembinaan pengadaan bibit, perbenihan/perbibitan, alsintan, irigasi dan perlindungan tanaman;
- g. Penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan terhadap peredaran, penggunaan bahan sarana produksi benih, pupuk, pestisida dan alat mekanisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan usaha ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura, konservasi lahan dan perlindungan tanaman;
- i. Penyiapan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh ; (1) Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Pangan, (2) Seksi Produksi dan Pengembangan Hortikultura, dan (3) Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman.

5. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan bimbing teknis di bidang usaha perkebunan. Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengendalian di bidang perkebunan;

- b. Penyiapan bahan bimbingan, pembinaan dalam rangka pengembangan usaha perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- c. Penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan perizinan usaha perkebunan;
- d. Penyiapan bahan pengawasan terhadap peredaran, penggunaan bahan tanam, pupuk, pestisida dan sarana produksi perkebunan;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sumber daya perkebunan;
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan usaha ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, dan diversifikasi usaha perkebunan;
- g. Penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan dalam pemanfaatan dan aplikasi teknologi dan pengolahan hasil perkebunan;
- h. Penyiapan bahan bimbingan dalam rangka penyebaran informasi, promosi produk dan pemasaran hasil perkebunan;
- i. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perlindungan tanaman dan lahan perkebunan;
- j. Penyiapan bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sarana prasarana perkebunan;
- k. Penyiapan bahan bimbingan teknis aktifitas pengadaan bibit dan perbenihan/pembibitan perkebunan;
- l. Penyiapan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Perkebunan dibantu oleh ; (1) Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan, (2) Seksi Teknologi dan Pengembangan Hasil Perkebunan, dan (3) Seksi Perlindungan Perkebunan.

6. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, bimbingan teknis, perbibitan, produksi, pakan dan pengolahan produk hasil ternak. Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengembangan ternak bibit unggul.
- b. Penyiapan pembinaan dalam pengadaan dan penyaluran ternak bibit kepada masyarakat.
- c. Penyiapan pembinaan dalam pembuatan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- d. Penyiapan pembinaan dalam pengembangan hijauan pakan ternak.
- e. Penyiapan pembinaan dalam pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan.
- f. Penyediaan pembinaan dalam penanganan dan pemanfaatan limbah peternakan.
- g. Penyiapan pembinaan pengembangan teknologi pengolahan dan mutu hasil peternakan.
- h. Penyiapan koordinasi dalam pengawasan perdagangan lintas batas dan antar daerah.
- i. Penyiapan koordinasi dalam pembinaan permodalan/kredit usaha peternakan.
- j. Penyiapan bahan fasilitasi dan pembinaan serta pengawasan terhadap sistem kemitraan peternak.
- k. Penyiapan bahan fasilitasi dan pembinaan serta pengawasan terhadap sistem kemitraan peternak.
- l. Penyiapan koordinasi dalam penyiapan rekomendasi perizinan dan pelayanan bidang peternakan.
- m. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pakan.
- n. Penyiapan bahan perencanaan bimbingan dan pengawasan produk dan hasil ternak.
- o. Penyiapan bahan pemantauan informasi harga pasar.
- p. Penyiapan pelaporan bidang peternakan.
- q. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Peternakan dibantu oleh ; (1) Seksi Produksi Ternak; (2) Seksi Perbibitan Ternak ; dan (3) Seksi Pakan, Pengolahan Produk dan Hasil Ternak.

7. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2), mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan bimbingan dalam pelaksanaan pengamatan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan pengawasan kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan serta penanganan hygiene dan sanitasi bahan pangan asal hewan, kesejahteraan hewan serta pembinaan kelembagaan veteriner. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan keswan dan kesmavet.
- b. penyiapan pelaksanaan analisa epidemiologi pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner.
- c. penyiapan pembinaan dan pengawasan kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan serta produk hewan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan.
- d. penyiapan pemberian pembinaan alat dan mesin teknologi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- e. penyiapan pelaksanaan fasilitasi rekomendasi, pengujian dan pengawasan peredaran obat hewan dan residu obat hewan, produk hewan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan serta pelayanan medik veteriner.
- f. penyiapan pembinaan terhadap kelembagaan veteriner.
- g. melaksanakan penyiapan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Penyuluhan dibantu oleh ; (1) Seksi Keswan (Kesehatan Hewan), (2) Seksi Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner), dan (3) Seksi Sarana Prasarana dan Pembinaan Kelembagaan Veteriner.

8. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis penyuluhan, pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia penyuluhan dan penyebaran informasi/materi penyuluhan. Bidang penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pembinaan penyusunan program penyuluhan dan rencana penyelenggaraan penyuluhan;
- b. Penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan tata penyuluhan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi pengumpulan materi penyuluhan dan persiapan penyebaran informasi;
- d. Penyiapan bahan koordinasi teknis serta bimbingan dan pembinaan pelaksanaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan upaya menumbuh kembangkan serta memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama/petani dan pelaku usaha agribisnis dan agroforestri;
- f. Penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan penyuluh PNS dan penyuluh swadaya;
- g. Penyiapan bahan pedoman dan bimbingan teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh;
- h. Penyiapan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Penyuluhan dibantu oleh ; (1) Seksi Programa Penyuluhan, (2) Seksi Kelembagaan dan SDM Penyuluhan, dan (3) Seksi Pengkajian Metode dan Teknologi Penyuluhan.

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai terdiri dari 3 (tiga) UPT yaitu ; (1) UPT Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium Veteriner dan (3). UPT Rumah Potong Hewan

Secara lengkap dapat dilihat struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada lampiran 1 Renstra ini.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, diperlukan personalia yang memadai dan sarana dan prasarana penunjang guna mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada tahun 2023 sebanyak 72 orang. Berdasarkan golongan, terdapat 13 orang pegawai golongan IV, 50 orang golongan III, 2 orang golongan II, 7 Orang PPPK. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.B.1.

**Tabel 2.B.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023**

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Golongan IV	13	18,05
2	Golongan III	50	69,44
3	Golongan II	2	2,77
4	PPPK	7	9,72
Jumlah		72	100,00

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 18 orang, S1 sebanyak 46 orang, D3 sebanyak 5 orang, dan SLTA sebanyak 3 orang. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.B.2.

Tabel 2.B.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	S2	18	25,00
2	S1	46	63,89
3	DIII	5	6,94
4	SLTA	3	4,17
Jumlah		72	100,00

Jumlah pegawai berdasarkan latar belakang atau jurusan pendidikan yang ditamatkan pada tingkat SLTA sampai Strata II (S2) sebanyak 47 orang mempunyai latar belakang atau jurusan pendidikan teknis, dan sebanyak 25 orang mempunyai latar belakang atau jurusan pendidikan non teknis. Rincian jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.B.3.

Tabel 2.B.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang/Jurusan Pendidikan Tahun 2023

NO	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	JUMLAH	%
A	TEKNIS		
1	S2	12	16,67
2	S1	29	40,27
3	DIII	4	5,55
4	SLTA	2	2,77
Jumlah		47	65,27
B	NON TEKNIS		
1	S2	6	8,34
2	S1	17	23,61
3	DIII	1	1,38
4	SLTA	1	1,38
Jumlah		25	34,73

Berdasarkan jabatan struktural, terdapat 15 pegawai yang menduduki jabatan struktural, terdiri atas 1 orang eselon II, 1 orang eselon IIIa dan 6 orang eselon IIIb, 4 orang eselon IVa dan 3 orang eselon IVb.

Sarana dan prasarana penunjang atau perlengkapan yang terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas berupa barang inventaris yang merupakan aset dapat dilihat pada tabel 2.B.4.

Tabel 2.B.4.
Sarana dan Prasarana
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai
Tahun 2023

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
A	BANGUNAN		
1	Bangunan Gedung Kantor	10	Unit
B	KENDARAAN DINAS		
1	Station Wagon	2	Unit
2	Pick Up	2	Unit
3	Mobil Box	1	Unit
4	Double Cabin	1	Unit
5	Sepeda motor	68	Unit
D	PERALATAN		
1	Komputer PC	21	Unit
2	Laptop	10	Unit
3	Printer	25	Unit
4	AC	38	Unit

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu : 1 (satu) Urusan Wajib yaitu Urusan Ketahanan Pangan dan 2 (dua) Urusan Pilihan yaitu Urusan Pertanian. Sampai saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai belum memiliki standar pelayanan minimal. Pencapaian pelayanan kinerja urusan wajib ketahanan pangan, urusan pilihan pertanian telah mempedomani dan telah sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Pencapaian pelayanan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai yang ditetapkan dalam rencana strategis dalam dilihat pada Tabel T-C23 di lampiran 2 Renstra ini.

Dari tabel T-C23 sebagaimana lampiran 2 Renstra ini dapat dilihat secara keseluruhan bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 tingkat pencapaiannya cukup baik dan memuaskan, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya di atas seratus persen.

1. Indikator Angka Kecukupan Protein

Standar untuk Angka Kecukupan Protein nasional dengan AKG sebesar 57 gr/kapita/hari. Sedangkan target yang ingin dicapai Kota Dumai pada tahun 2021 yakni sebesar 52 gr/kapita/hari. Capaian indikator kinerja Angka Kecukupan Protein tahun 2021 sangat memuaskan dan sesuai target yang telah ditetapkan yakni 57,00 gr/kapita/hari atau 110,00% dari target 52 gr/kapita/hari.

2. Indikator Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis

Indikator Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis dengan capaian tahun 2021 sebanyak 2 kasus, capaian ini sangat baik dimana target tahun 2021 maksimal sebanyak 10 kasus.

3. Indikator Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis

Indikator Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis non zoonosis dengan target tahun 2021 maksimal sebanyak 8 kasus dengan capaian 7 kasus, capaian ini sangat baik.

4. Indikator Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan

Indikator Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan Tahun 2021 dengan target 8 kasus dengan capaian 1 kasus, capaian ini sangat baik.

5. Indikator Cakupan Bina Kelompok Tani

Indikator Cakupan Bina Kelompok Tani dengan target sampai dengan tahun 2021 sebanyak 636 Kelompok dan tercapai sebanyak 664 Kelompok atau 104,40%. Target tahun 2011 sebesar 192 Kelompok Tani dengan realisasi 197 Kelompok Tani atau 110%.

6. Indikator Produksi Komoditi Pertanian

Indikator kinerja Produksi Komoditi Pertanian target tahun 2021 sebanyak 21.266 Ton dengan realisasi indikator ini tahun 2021 sebesar 28.086 Ton atau 132,07 %.

7. Indikator Produksi Komoditi Perkebunan

Indikator kinerja Produksi Komoditi Perkebunan target tahun 2021 sebanyak 85.7566 Ton dengan realisasi indikator ini tahun 2021 sebesar 85.840 Ton atau 100,09 %.

8. Indikator Populasi Ternak

Indikator kinerja Populasi Ternak target tahun 2021 sebanyak 6.400 Satuan Ternak dengan realisasi indikator ini tahun 2021 sebesar 5.918 Ton atau 92,47 %.

Dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai mendapat alokasi dana, baik dari APBN, APBD provinsi maupun APBD Kota Dumai. Pendanaan ini bertujuan agar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dapat melakukan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan optimal.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai tahun 2021-2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya, perkembangan anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.C.1.

Tabel 2.C.1.
Perkembangan Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Tahun 2017-2020.

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pagu Anggaran (Rp)	7.748.409.350	10.871.955.050	11.167.415.600	16.762.000.000	22.775.714.401	
2	Realisasi (Rp)	7.657.836.181	9.463.137.245	10.079.845.789	15.889.667.089	21.574.240.901	
3	Realisasi (%)	98,83%	87,04	90,06	94,80	94,72	

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bawah setiap tahun anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai mengalami kenaikan. Untuk capaian kinerja indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C23 di Lampiran 2 dokumen Renstra ini. Sedangkan untuk pagu anggaran dan capaian realisasi keuangan dapat dilihat pada Tabel T-C24 di Lampiran 3 dokumen Renstra ini.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai.

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masing kurangnya ketersediaan pangan utama untuk masyarakat
- b. Masih terdapatnya kasus hewan menular zoonosis pada ternak unggulan di Kota Dumai
- c. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;
- d. Tekanan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- e. Belum tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- f. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian

Hal-hal tersebut diatas berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka menyusun proyeksi perkembangan sektor pertanian di Kota Dumai tahun 2021-2026, yang menjadi landasan adalah hasil-hasil yang telah dicapai pada periode lalu. Oleh karena itu, sasaran utama yang akan dicapai adalah sekurang-kurangnya dapat mempertahankan kondisi yang telah dicapai, dan jika memungkinkan akan diupayakan dengan segala kemampuan yang ada untuk meningkatkan kondisi ke arah yang lebih baik.

Diharapkan melalui pembangunan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan/hortikultura, sub sektor perkebunan, dan sub sektor peternakan dan keswan dapat mendukung pengembangan sektor industri terutama industri yang berbasis pertanian (agroindustri). Agroindustri yang dominan dan berkembang pesat di Kota Dumai adalah

industri pengolahan kelapa sawit. Dengan telah berdirinya pabrik pengolahan kelapa sawit, dapat saling mendukung terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Sasaran pembangunan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura sasaran peningkatan produksi lebih difokuskan pada tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan tanaman padi lebih difokuskan untuk peningkatan produktifitas melalui penggunaan bibit unggul dan intensifikasi tanaman. Sasaran peningkatan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.D.1.

Tabel 2.D.1.
Sasaran Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2026

NO	KOMODITAS	Produksi Tahun 2020 (Ton)	Sasaran Produksi Tahun 2026 (Ton)
1.	Produksi Sektor Pertanian	21.041	22.250

Untuk sasaran peningkatan produktifitas tanaman padi tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.D.2.

Tabel 2.D.2.
Sasaran Peningkatan Produktifitas Tanaman Padi Tahun 2026

NO	KOMODITAS	Produktifitas Tahun 2020 (Ton/Ha)	Sasaran Produktifitas Tahun 2026 (Ton/Ha)
1.	Padi	3,3	3,9

Sedangkan untuk sektor pertanian khususnya di sub sektor perkebunan yaitu peningkatan produksi komoditas perkebunan terutama kelapa sawit dan karet. Sasaran peningkatan produksi komoditas tanaman perkebunan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.D.3.

Tabel 2.D.3.
Sasaran Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Tahun 2026

NO	KOMODITAS	Produksi Tahun 2020 (Ton)	Sasaran Produksi Tahun 2026 (Ton)
1.	Produksi Sektor Perkebunan	84.756	86.500

Peningkatan produksi tanaman perkebunan ini khususnya untuk komoditas tanaman perkebunan dilaksanakan melalui penggunaan bibit unggul, peremajaan tanaman perkebunan dan intensifikasi tanaman serta diversifikasi tanaman perkebunan.

Sedangkan untuk sektor pertanian khususnya di sub sektor peternakan yaitu peningkatan populasi ternak unggulan. Sasaran peningkatan populasi ternak unggulan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.D.4.

**Tabel 2.D.4.
Sasaran Peningkatan Populasi Ternak
Tahun 2026**

NO	KOMODITAS	Produksi Tahun 2020 (Satuan Ternak)	Sasaran Produksi Tahun 2026 (Satuan Ternak)
1.	Populasi Ternak	6.303	7.400

Peningkatan populasi ternak unggulan ini dilaksanakan melalui inseminasi buatan (IB) terhadap indukan yang produktif.

Sedangkan untuk sektor pertanian khususnya di sub sektor kesehatan hewan yaitu penurunan kasus penyakit hewan menular strategis zoonosis dan non zoonosis serta penurunan kasus cemaran Penyakit Asal Hewan (PAH). Sasaran tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.D.5.

**Tabel 2.D.5.
Sasaran Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular
Tahun 2026**

NO	URAIAN	Jumlah Tahun 2020 (Kasus)	Sasaran Tahun 2026 (Kasus)
1.	Kasus PHMS-Z	11 Kasus	7 Kasus
2.	Kasus PHMS-NZ	15 Kasus	10 Kasus
3.	Kasus PAH	10 Kasus	3 Kasus

Penurunan kasus penyakit hewan menular strategis zoonosis dan non zoonosis serta penurunan kasus cemaran Penyakit Asal Hewan (PAH) dilakukan dengan vaksinasi dan peningkatan pelayanan keswan oleh medik dan paramedik veteriner di puskesmas.

Dalam pencapaian peningkatan ketahanan pangan sasaran strategis yang dilaksanakan melalui diversifikasi pangan atau keragaman konsumsi pangan. Sasaran percepatan keragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang yang

dicerminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH). Indikator sasaran ini dapat diukur melalui Angka Kecukupan Protein.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah jika dikaitkan dengan dokumen pendukung lainnya :

- Renstra KL dan OPD Provinsi

Melihat Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 masih menitik beratkan pada program dan kegiatan untuk pencapaian swasembada pangan terutama padi, jagung dan kedelai. Kedaulatan pangan menjadi factor utama pembangunan yang meliputi: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Selain pencapaian swasembada pangan, kementerian juga focus untuk swasembada daging serta peningkatan ekonomi petani.

Sedangkan sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Riau tahun 2019-2024 khususnya pembangunan pertanian diwujudkan melalui misi 7, yaitu : Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui misi 7 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian/perkebunan, dengan sasaran:
 - 1) mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan,
 - 2) meningkatkan infrastruktur pengairan terhadap lahan pertanian,
 - 3) menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk mengelola lahan pertanian tanaman pangan,
 - 4) meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana pertanian,
 - 5) penguatan kelembagaan kelompok tani dan pemakai air oleh penyuluh pertanian.
2. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam struktur ekonomi Riau, dengan sasaran:
 - 1) terciptanya lapangan kerja disektor pertanian,
 - 2) pengembangan industri hilir pertanian

Jika dikaitkan dengan Renstra Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Dumai maka dirasa sudah sejalan dimana program dan kegiatan yang telah disusun untuk pengembangan dan produksi pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, pertanian lahan pekarangan dan peternakan. Selain itu peningkatan ketahanan pangan menjadi tujuan utama di sektor ketahanan pangan. Dimana pemenuhan kebutuhan pangan utama menjadi factor penting.

- Dokumen RTRW dan KLHS

Program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai yang sejalan dengan RTRW dan KLHS meliputi :

1. Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pada Renstra 2021-2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai melalui kegiatan ini terdapat penyiapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan target setiap tahunnya 100 Ha.
2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Pada kegiatan ini terdapat usaha pengembangan pertanian hortikultura dimana lokasinya hampir merata di Kota Dumai terletak di Kecamatan Medang Kampai, Bukit Kapur, Sungai Sembilan dan Dumai Selatan dengan komoditas utama sayuran dan buah-buahan.
3. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Kawasan
Didalam kegiatan ini terdapat pengembangan perkebunan di Kota Dumai, luas perkebunan di Kota Dumai yang cukup luas membuat pengembangan dan produksi tanaman perkebunan juga menjadi kegiatan utama.

Jika dikaitkan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka hasil telaah terhadap tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai adalah munculnya pengaruh lingkungan pada program pengembangan pertanian sebagai berikut :

1. Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lahan.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi yakni rendahnya kandungan bahan organik pada lahan pertanian. Faktor penghambatnya dengan

dilaksanakan intensifikasi pertanian mengharuskan adanya peningkatan produksi menyebabkan petani tergantung pada pupuk anorganik.

2. Meningkatnya emisi gas rumah kaca sehingga mengakibatkan anomali iklim

Permasalahan pelayanan yang dihadapi yakni perubahan pola tanam dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman pangan dan hortikultura. Faktor penghambatnya yakni masih rendahnya pupuk/pestisida organik. Untuk ini dinas telah menyiapkan satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dimana target utama yaitu penanggulangan bencana mulai dari kebakaran lahan dan kebun, hama dan penyakit tanaman serta hal-hal lain.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai yang berkaitan dengan pelayanan di bidang urusan pangan dan pertanian dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

Urusan Pangan :

- a. Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- b. Tingginya ketergantungan impor pangan dari daerah tetangga;
- c. Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas;
- d. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan;
- e. Rendahnya kuantitas ketersediaan pangan utama belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat Kota Dumai;
- f. Belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal;
- g. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
- h. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;
- i. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

Urusan Pertanian :

- a. Masih terdapatnya kasus hewan menular zoonosis pada ternak unggas di Kota Dumai (Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis ini tetap sama di tahun 2016, dan di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 29 kasus serta terus menurun pada tahun 2018 yaitu menjadi 23 kasus.
- b. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;
- c. Tekanan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan;

- d. Belum tersedia lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. Belum maksimalnya produksi sektor pertanian dan perkebunan;
- f. Pengembangan Populasi ternak masih terbatas;
- g. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian;

B. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Dumai yang tercantum dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
3. Tahun 2026: Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dengan Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD Kota Dumai.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Dumai, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai berkontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD Kota Dumai sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Misi yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai yang tercantum dalam RPJMD Kota Dumai adalah misi pertama yakni :

Misi 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri

Misi ini ditempuh untuk meningkatkan perekonomian kota dari segala sektor, salah satunya sektor pertanian agar mampu memenuhi kebutuhan lokal dan menjadi sektor basis Kota Dumai sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat khususnya petani.

Disamping hal tersebut misi ini juga untuk meningkatkan ketahanan pangan yaitu kondisi dimana terpenuhinya Pangan bagi masyarakat kota Dumai, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Kemampuan dalam memproduksi bahan Pangan utama diharapkan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan

memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat sehingga aman untuk dikonsumsi.

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Selain memperhatikan kebijakan strategis daerah dalam melaksanakan aktifitas pembangunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai juga turut memperhatikan kebijakan strategis yang bersifat nasional untuk kesinergisan dalam pelaksanaan pembangunan.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2019- 2024 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-4 (2020-2024) sebagai kelanjutan dari RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) yang telah berakhir. RPJMN tahap ke-4 (2020-2024) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2019-2024 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, (6) Pengembangan bibit ternak

potong 535 ribu ekor dan budidaya ternak potong 1.075 kelompok, serta (7) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Sedangkan sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Riau tahun 2019-2024 khususnya pembangunan pertanian diwujudkan melalui misi 7, yaitu : Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui misi 7 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian/perkebunan, dengan sasaran: 1) mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, 2) meningkatkan infrastruktur pengairan terhadap lahan pertanian, 3) menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk mengelola lahan pertanian tanaman pangan, 4) meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana pertanian, 5) penguatan kelembagaan kelompok tani dan pemakai air oleh penyuluh pertanian.
2. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam struktur ekonomi Riau, dengan sasaran: 1) terciptanya lapangan kerja disektor pertanian, 2) pengembangan industri hilir pertanian.

Berdasarkan penjelasan diatas, dan untuk mendukung sasaran strategis Kementrian Pertanian dan pembangunan pertanian Propinsi Riau maka tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut ;

1. Penguatan kelembagaan petani.
2. Meningkatnya jumlah produksi, populasi dan produktifitas pertanian peternakan.

3. Menurunnya kasus penyakit hewan menular strategis zoonosis/non zoonosis (PHMS-Z/NZ) dan cemaran biologis, kimia dan fisika PAH.
4. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana pola ruang wilayah Kota di Kota Dumai seperti yang tertuang dalam Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung yang meliputi ; (a) kawasan perlindungan setempat, (b) kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan (c) kawasan rawan bencana.
2. Kawasan Budidaya yang meliputi ; (a) kawasan peruntukan perumahan (b) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, (c) kawasan peruntukan pemerintahan, (d) kawasan peruntukan industri, (e) kawasan peruntukan pariwisata, (f) kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau, (g) kawasan peruntukan sektor informal; (h) kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan (i) kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan pertanian termasuk dalam kawasan peruntukkan lainnya yang terdiri dari:

1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi : (1) kawasan pusat pelayanan pertanian terpadu terletak di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan luas \pm 49 ha (empat puluh sembilan hektar); dan (2) kawasan peruntukan lahan basah terletak di Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai Barat dan Dumai Selatan yang diprioritaskan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas \pm 10.830 ha (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh hektar).

2. Kawasan Pertanian Hortikultura

Kawasan pertanian hortikultura terletak di Kecamatan Medang Kampai, Bukit Kapur, Sungai Sembilan dan Dumai Selatan dengan komoditas utama sayuran dan buah-buahan dengan luas \pm 4.656 ha (lebih kurang empat ribu enam ratus lima puluh enam hektar).

3. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan meliputi : (1) kawasan peruntukan pertanian perkebunan terletak di Kecamatan Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Medang

Kampai, Dumai Timur, Dumai Barat dan Dumai Selatan dengan luas ± 76.557 (lebih kurang tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh hektar); dan (2) kawasan peruntukan perkebunan rakyat terletak di Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan dengan luas ± 2.069 ha (lebih kurang dua ribu enam puluh sembilan hektar).

4. Kawasan cadangan pertanian dan perkebunan.

Kawasan peruntukan cadangan pertanian dan perkebunan terletak di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan luas ± 1.363 ha (lebih kurang seribu tiga ratus enam puluh tiga hektar).

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Namun dalam implementasinya masih ada yang berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Salah satu isu strategis yang perlu ditangani yakni semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kota Dumai terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan, baik primer maupun sekunder, menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, dan berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga berakibat pada semakin menurunnya produksi dan produktivitas pertanian dan kondisi lingkungan. Alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga mengakibatkan peningkatan potensi bencana alam seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Isu strategis terkait perubahan iklim global, krisis pangan dan energi menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat luas terutama masyarakat pedesaan yang kegiatan utamanya pada sektor pertanian. Perubahan iklim global sekarang ini akibat dari penerapan teknologi revolusi hijau budi daya pertanian sejak tahun 1970-an yang menyebabkan petani menggantungkan

sepenuhnya pada penggunaan pupuk anorganik yang berakibat pada penurunan kandungan bahan organik tanah. Keamanan Pangan pada produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Disisi lain, penambahan jumlah penduduk dari tahun ketahun di Kota Dumai justru menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Hasil telaah terhadap kajian Lingkungan Hidup Strategis yang terkait tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai adalah munculnya pengaruh lingkungan pada program pengembangan pertanian sebagai berikut :

1. Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lahan.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi yakni rendahnya kandungan bahan organik pada lahan pertanian. Faktor penghambatnya dengan dilaksanakan intensifikasi pertanian mengharuskan adanya peningkatan produksi menyebabkan petani tergantung pada pupuk anorganik.

2. Meningkatnya emisi gas rumah kaca sehingga mengakibatkan anomali iklim

Permasalahan pelayanan yang dihadapi yakni perubahan pola tanam dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman pangan dan hortikultura. Faktor penghambatnya yakni masih rendahnya pupuk/pestisida organik.

Salah satu upaya untuk meminimalisir dengan cara menggalakkan sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida kimia sesuai anjuran melalui SLPHT, SLPTT dan memperbanyak penggunaan pupuk organik, agensia hayati dan pestisida nabati.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Persoalan ancaman dan kerawanan pangan dunia beberapa tahun terakhir selain berkaitan sangat erat dengan pertumbuhan penduduk juga sensitif terhadap perubahan iklim global. Ketidak stabilan ketahanan pangan, cenderung memicu terjadinya ketidakstabilan ekonomi maupun gejolak politik. Dalam hal ini, krisis pangan akan terjadi manakala tidak ada upaya-upaya yang serius untuk memperbaiki struktur produksi pangan. Isu Strategis harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan pertanian daerah mengingat beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada

periode lima tahun sebelumnya akan menjadi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Beberapa isu strategis yang mendesak untuk ditangani :

1. Upaya pemenuhan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan di Kota Dumai masih rentan terhadap isu pemanasan global yang berdampak terjadinya perubahan iklim;
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, belum adanya lahan pertanian pangan berkelanjutan;
3. Kelembagaan petani yang masih lemah, yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
4. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis;
5. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian;
6. Mahalnya harga sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, pestisida, alsintan dan lain-lain;
7. Masih rendahnya produksi sektor pertanian dan perkebunan;
8. Masih rendahnya anggaran untuk pengembangan populasi ternak unggulan;
9. Masih adanya ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis, Zoonosis dan Non Strategis.
10. Makin berkurangnya tenaga penyuluh pertanian di Kota Dumai

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah pada Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Lampiran 4 dokumen Renstra ini.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum Kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Dan sebagaimana ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, bahwa Eselon II keatas wajib memiliki Visi dan Misi dalam melaksanakan tugas, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai segera menyusun visi dan misi.

Penyusunan visi dan misi ini dilakukan dengan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Dumai yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Maka berdasarkan Visi Pemerintah Daerah Kota Dumai ditetapkan Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai secara lengkap adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Dalam rangka upaya mewujudkan visi tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai mencanangkan misi yang mengacu pada misi pertama Pemerintah Kota Dumai yaitu ” : **Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri.**

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Guna mewujudkan visi dan misi perlu ditetapkan tujuan dan sasaran dalam bentuk terukur dan spesifik, merupakan kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Rumusan tujuan dan sasaran sebagai implementasi visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Meningkatkan pendapatan petani, dengan 1 (satu) indikator yaitu :

- Pendapatan Perkapita Petani

Indikator ini terhitung mulai tahun 2024 diubah menjadi

- Nilai Tukar Petani

Tujuan ini mempunyai 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina dan Diberi Bantuan, dengan 1 (satu) indikator :
 - Cakupan Bina Kelompok Tani
2. Meningkatnya Produksi Pertanian, dengan 5 (lima) indikator :
 - Produksi sektor perkebunan
 - Produksi sektor pertanian
 - Populasi ternak
 - Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya
 - Jumlah Penggunaan Alat Mesin Pertanian
3. Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular, dengan 2 (dua) indikator :
 - Jumlah Kasus Hewan Menular
 - Jumlah Kasus Cemaran Pangan Asal Hewan (PAH)

Tujuan 2

Peningkatan ketahanan pangan masyarakat, dengan 1 (satu) indikator yaitu :

- Pola Pangan Harapan (PPH)
- Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
- Ketersediaan Pangan Utama
- Penguatan Cadangan Pangan

Tujuan ini mempunyai 1 (satu) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan 1 (satu) indikator yaitu :
 - Ketersediaan Protein / Angka Kecukupan Protein
 - Angka Kecukupan Protein

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.B.1. (T-C25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2023	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Pendapatan Petani		Pendapatan Per Kapita Petani (Rp.juta)	223,4	228,82	234,54	-	-	-
			Nilai Tukar Petani (Poin)				150.53	152.79	155.08
		Meningkatnya Jumlah Kelompok Yang Dibina dan Diberi Bantuan	Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok)	149	165	170	175	180	185
			Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Sektor Perkebunan (Ton)	85250	85500	85750	86000	86250
		Produksi Sektor Pertanian (Ton)	21000	21250	21500	21750	22000	22250	
		Populasi Ternak (Satuan Ternak)	6400	6600	6800	7000	7200	7400	
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya (Ton/Ha)	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah Penggunaan Alat Mesin Pertanian (Unit)	10	12	14	16	18	20
			Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Kasus)	15	13	11	9	7	5
			Jumlah Kasus Cemaran Pangan Asal Hewan (Kasus)	8	7	6	5	4	3
			Pola Pangan Harapan (PPH)	83,75	84,58	85,41	-	-	-
		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	-	-	-	73,66	75,12	76,40	
		Ketersediaan Pangan Utama (%)	34,37	36,03	37,70	-	-	-	
		Penguatan Cadangan Pangan (%)	20,00	22,50	25,00	27,50	30,00	32,50	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Protein (Gram/Kapita/Hari)	52,25	52,50	52,75	53,00	53,25	53,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Jika dilihat misi yang dijalankan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai yaitu **Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhan dan Industri** (Misi I Kota Dumai) maka terdapat dua tujuan dan empat sasaran. Sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah :

- (1) Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina dan Diberi Bantuan,
- (2) Meningkatnya Produksi Pertanian,
- (3) Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular,
- (4) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai menyusun dan melaksanakan 4 (empat) strategi utama meliputi :

- (1) Menyiapkan program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat,
- (2) Mensinergikan pengembangan kawasan sektor pertanian dengan pemanfaatan lahan tidur dengan penggunaan teknologi modern,
- (3). Meningkatkan kualitas kesehatan hewan dan ternak serta produk pangan asal hewan.
- (4).Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penanganan daerah stunting.

B. Kebijakan

Berdasarkan penjelasan diatas, dan untuk mendukung 4 (empat) strategi utama maka arah kebijakan yang diambil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut ;

Strategi (1) Menyiapkan program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat, arah kebijakannya terdiri dari :

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembagaan dan SDM penyuluhan pertanian;
- Memperkuat kelembagaan dan pembiayaan pelaku usaha sektor pertanian;
- Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat melalui kelompok tani dalam segala sektor pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan maupun kelompok wanita tani pengelola pertanian lahan pekarangan;

Strategi (2). Mensinergikan pengembangan kawasan sektor pertanian dengan pemanfaatan lahan tidur dengan penggunaan teknologi modern, arah kebijakannya terdiri dari :

- Menggalakan Penggunaan bibit unggul pertanian dan perkebunan;
- Memfasilitasi penyediaan lahan pangan pertanian berkelanjutan;
- Menyediakan sarana prasarana, SDM untuk meningkatkan mutu dan produksi pertanian dan perkebunan serta populasi ternak;

Strategi (3). Meningkatkan kualitas kesehatan hewan dan ternak serta produk pangan asal hewan, arah kebijakannya terdiri dari :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Strategi (4). Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penanganan daerah stunting, arah kebijakannya terdiri dari :

- Meningkatkan kuantitas, kualitas dan keamanan pangan masyarakat;
- Penyediaan Cadangan pangan daerah;
- Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pertanian lahan pekarangan

Untuk lebih jelasnya tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai pada tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C26 sebagaimana Lampiran 5 dokumen Renstra ini.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

A. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Sebagai implementasi untuk mewujudkan visi dan misi maka Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai disusun kebijakan-kebijakan ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai untuk tahun 2021 – 2026 akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai serta sesuai dengan misi pertama Kota Dumai yaitu " *Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri* " maka disusunlah program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai sesuai urusannya sebagai berikut:

I. Urusan Wajib : Pangan

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- a. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.
 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota
 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota
- b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita / Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun
- 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :**
- a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- 3. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :**
- a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Penyediaan Sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota.
- 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :**
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan DKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapannya;
 - Pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor;
 - Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor;
 - Penyediaan Peralatan rumah tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - Pengadaan mebel;
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
 - Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;

- g. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan jasa surat menyurat;
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
 - Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
 -

II. Urusan Pilihan : Pertanian

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
- b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
- c. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Kab/ Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil.

- d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penjaminan peredaran benih/bibit ternak;
 - Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten/kota lainnya, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain;

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B;
 - Penyusunan Peta Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan/LP2B
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Kawasan Pertanian
- b. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
- c. Penataan Prasarana Pertanian
 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota , dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis.
- b. Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan atau pengeluaran hewan dan produk hewan.
- c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kab/ Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan.
 - Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan
- e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan hewan.
 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha

5. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
 - Pembentukan badan usaha milik petani;
 - Pembentukan penyenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota.

B. RENCANA PENDANAAN

Pagu Pendanaan untuk Program yang akan dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai selama masa Renstra 2021-2026 per tahunnya dapat dilihat pada tabel 6.B.1 sebagai berikut :

Tabel 6.B.1.
Pagu Indikatif Pendanaan
Renstra DKPP Kota Dumai Tahun 2021-2026

NO	TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Keterangan
1	2021	22.775.714.491	
2	2022	19.058.528.368	
3	2023	23.827.938.812	
4	2024	25.693.259.969	
5	2025	26.173.090.333	
6	2026	27.073.090.333	

Besar Pagu Pendanaan Renstra 2021-2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan nya dapat dilihat pada Tabel T-C27 sebagaimana Lampiran 6 dokumen Renstra 2021-2026 ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai merupakan penjabaran teknis RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dengan Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Dumai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai berkontribusi untuk mewujudkan Misi Pertama, yakni **Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri** dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Urusan Pilihan : Pertanian

1. Cakupan Bina Kelompok Tani

Arah kebijakan indikator ini adalah Meningkatkan jumlah kelompok tani yang dibina dan diberi bantuan. Target yang ingin dicapai sampai tahun 2026 adalah 466 kelompok tani.

2. Produksi Sektor Pertanian

Jumlah produksi sektor pertanian yang ditargetkan 129.750 ton pada tahun 2026 dengan yang meliputi komoditi sebagai berikut :

a. Tanaman Padi dan Palawija

b. Hortikultura, tanaman buah-buahan, sayur-sayuran dan lainnya

3. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya ditargetkan 3,9 Ton/ Ha pada tahun 2026 yaitu pada komoditi padi.

4. Jumlah Penggunaan Alat Mesin Pertanian

Jumlah Penggunaan Alat Mesin Pertanian ditargetkan ada penambahan sebanyak 70 unit pada tahun 2026 dengan yang meliputi :

- a. Handtraktor
- b. Cultivator
- c. Traktor roda 4
- d. Handsprayer
- e. Pompa Air Pertanian, dll

5. Produksi Sektor Perkebunan

Jumlah produksi sektor perkebunan yang ditargetkan 515.250 ton pada tahun 2026 dengan yang meliputi komoditi sebagai berikut :

- f. Kelapa sawit
- g. Karet
- h. Kelapa
- i. Kakao, dll

6. Populasi Ternak

Jumlah populasi ternak 7.400 Satuan Ternak pada tahun 2026, dengan ternak unggulan antara lain :

- a. Sapi
- b. Kerbau
- c. Kambing
- d. Domba, dll

7. Mengurangi Angka Penyakit Hewan Menular, baik yang Zoonosis maupun non zoonosis. Menurunnya angka penyakit hewan menular pada tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah kasus Penyakit Hewan Menular (PHMS-Z dan PHMS-NZ) 5 Kasus
- b. Jumlah kasus cemaran PAH 3 Kasus

Urusan Wajib : Ketahanan Pangan

1. Angka Kecukupan Protein

Angka kecukupan protein target yang akan dicapai adalah 53, 50 gram/kapita/hari pada tahun 2026.

Untuk lebih jelas indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 beserta target capain indikatornya, dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1. (T-C-28)
Indikator Kinerja Utama Dinas DKPP Kota Dumai yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR / IKU	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	- Pendapatan Perkapita Petani	Rp.210,30 juta	Rp.223,24 juta	Rp.228,82 juta	Rp.234,54 juta	-	-	-	Rp.234,54 juta
	- Nilai Tukar Petani	-	-	-	-	138,46	141,92	145,47	145,47
	- Cakupan Bina Kelompok Tani	128 Kelompok	149 Kelompok	165 Kelompok	170 Kelompok	175 Kelompok	180 Kelompok	185 Kelompok	1.150 Kelompok
	- Produksi Sektor Pertanian	20.818 Ton	21.000 Ton	21.250 Ton	21.500 Ton	21.750 Ton	22.000 Ton	22.250 Ton	150.568 Ton
	- Produksi Sektor Perkebunan	84.756 Ton	85.250 Ton	85.500 Ton	85.750 Ton	86.000 Ton	86.250 Ton	86.500 Ton	600.006 Ton
	- Populasi Ternak	6.303 Ton	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400	7.400
	- Produktivitas padi atau Bahan pangan utama lainnya	Satuan Ternak 3,30 Ton/Ha	Satuan Ternak 3,40 Ton/Ha	Satuan Ternak 3,50 Ton/Ha	Satuan Ternak 3,60 Ton/Ha	Satuan Ternak 3,70 Ton/Ha	Satuan Ternak 3,80 Ton/Ha	Satuan Ternak 3,90 Ton/Ha	Satuan Ternak 3,90 Ton/Ha
	- Jumlah Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian	8 Unit	10 Unit	12 Unit	14 Unit	16 Unit	18 Unit	20 Unit	98 Unit
	- Jumlah kasus Hewan Menular (PHMS-Z dan PHMS-NZ)	17 Kasus (7 dan 10)	15 Kasus (6 dan 9)	13 Kasus (5 dan 8)	11 Kasus (4 dan 7)	9 Kasus (3 dan 6)	7 Kasus (2 dan 5)	5 Kasus (1 dan 4)	5 Kasus (1 dan 4)
	- Jumlah Kasus Cemaran PAH	8 Kasus	8 Kasus	7 Kasus	6 Kasus	5 Kasus	4 Kasus	3 Kasus	3 Kasus
2	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,91	83,75	84,58	85,41	-	-	-	85,41
	- Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	-	-	-	-	73,94	74,61	75,28	75,28
	- Ketersediaan Pangan Utama	-	32,78%	34,37 %	36,03 %	-	-	-	36,03%
	- Penguatan Cadangan Pangan	-	20,00%	22,50 %	25,00 %	27,50 %	30,00 %	32,50 %	32,50 %
	- Angka Kecukupan Protein	52,00 gr/kap/hari	52,25 gr/kap/hari	52,50 gr/kap/hari	52,75 gr/kap/hari	53,00 gr/kap/hari	53,25 gr/kap/hari	53,50 gr/kap/hari	53,50 gr/kap/hari

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai.

Pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Dumai, 07 Februari 2024

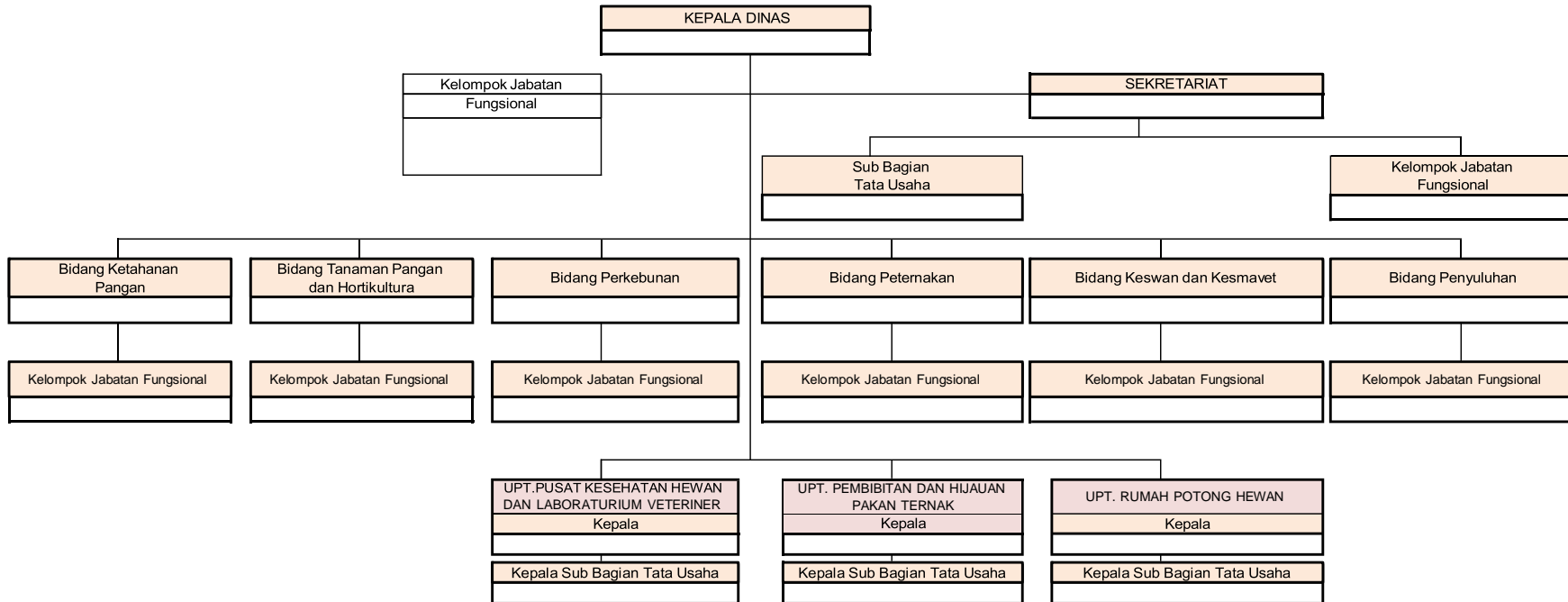
KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA DUMAI,



MUKHLIS SUZANTRI, S.Hut.T, M.T.
Pembina Tk.I,
NIP. 19750313 199403 1 002

LAMPIRAN 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR : 40 TAHUN 2022
 TANGGAL : 27 Desember 2022



LAMPIRAN 2

Tabel T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI
TAHUN 2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke -					Realisasi Capaian tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke - (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Angka Kecukupan Protein (Gram/Kapita/Hari)				50	50	52	52	52	50	52.25	52	52	57	100	105	100	100	110
2	Cakupan Bina Kelompok Tani (kelompok)				66	93	126	159	192	66	88	140	173	197	100	95	111	109	103
3	Produksi Komoditi Pertanian (Ton)				20,375	20,596	20,818	21,041	21,266	21,269	24,412	22,418	33,260	28,086	104	119	108	158	132
4	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)				83,756	84,256	84,756	85,256	85,756	84,256	84,856	85,025	85,340	85,840	101	101	100	100	100
5	Populasi Ternak (Satuan Ternak)				5,673	5,883	6,093	6,303	6,400	5,775	6,253	7,013	6,768	5,918	102	106	115	107	92
6	Jumlah Kasus Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik pada Pangan Asal Hewan (PAH) (Kasus)				16	14	12	11	8	7	-	-	1	1	100	100	100	100	100
7	Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis Zoonosis (Kasus)				30	23	17	15	10	30	7	6	5	2	100	100	100	100	100
8	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Non Zoonosis (Kasus)				30	25	20	10	8	15	3	-	6	7	100	100	100	100	100

LAMPIRAN 3

Tabel T-C.24.
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai 2017-2021**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2,021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah Kab/ Kota	2,167,297,742	2,574,264,850	3,005,520,550	3,195,617,855	12,914,223,489	2,157,719,626	2,206,375,004	2,913,462,469	3,111,889,491	12,132,501,681	99.65	93.05	98.39	96.48	-		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000	7,500,000	7,500,000	4,800,000	4,800,000	6,201,000	6,342,000	6,414,000	2,767,000	3,743,000	82.68	84.56	85.52	57.65	77.98		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	245,600,000	302,280,000	202,800,000	208,250,000	184,380,000	244,749,314	201,159,291	191,542,029	171,852,263	170,413,533	99.65	66.55	94.45	82.52	92.43		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74,700,000	63,000,000	47,000,000	40,000,000	-	74,700,000	63,000,000	46,923,000	39,550,000	-	100.00	100.00	99.84	98.88	-		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	37,600,000	40,000,000	25,300,000	12,700,000	-	35,466,700	31,692,020	16,223,779	11,200,000	-	94.33	79.23	64.13	88.19	-		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	290,269,800	340,000,000	294,400,000	335,945,000	-	290,269,800	335,694,000	294,076,000	335,775,000	-	100.00	98.73	99.89	99.95	0.00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	536,520,000	-	-	-	-	536,520,000	-	-	-	-	100.00		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	83,032,400	71,421,400	72,014,840	89,092,050	-	82,292,400	71,400,000	71,826,500	88,892,000	-	99.11	99.97	99.74	99.78	-		
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	69,125,500	73,720,000	67,050,000	79,350,000	75,728,225	69,125,500	73,500,000	66,809,000	79,130,000	73,314,900	100.00	99.70	99.64	99.72	96.81		
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11,172,000	10,602,000	8,132,000	11,695,000	11,973,120	11,172,000	10,500,000	7,821,000	11,595,000	11,429,000	100.00	99.04	96.18	99.14	95.46		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86,195,000	165,350,000	17,000,000	175,400,000	198,817,848	85,005,250	146,180,000	16,760,000	173,850,000	197,241,477	98.62	88.41	98.59	99.12	99.21		
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19,920,000	21,840,000	18,000,000	17,640,000	17,716,815	19,920,000	18,000,000	17,820,000	17,100,000	16,800,000	100.00	82.42	99.00	96.94	94.83		
Penyediaan Makanan dan Minuman	15,150,000	14,690,000	7,875,000	14,550,000	22,995,000	15,150,000	14,690,000	7,278,000	13,150,000	21,945,000	100.00	100.00	92.42	90.38	95.43		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	721,595,442	688,500,000	687,180,000	676,580,000	545,587,787	721,352,333	688,185,032	686,528,828	676,334,978	545,551,466	99.97	99.95	99.91	99.96	99.99		
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	166,800,000	166,800,000	170,800,000	190,000,000	-	166,800,000	166,800,000	168,400,000	168,400,000	-	100.00	100.00	98.59	88.63	-		
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	27,813,600	27,600,000	27,800,000	30,000,000	-	27,813,600	27,600,000	27,800,000	30,000,000	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-		
Pembangunan Gedung Kantor	-	-	950,000,235	200,000,000	862,040,208	-	-	928,716,408	199,681,750	777,976,035	-	-	100	100	90.25		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	62,000,000	-	-	-	-	61,600,000	-	-	-	-	99.35		
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	210,000,000	56,451,615	250,000,000	132,360,000	-	63,338,050	54,374,175	237,950,000	132,300,000	-	20	100	100	99.95		
Pengadaan Mebeleur	47,600,000	75,000,000	-	100,943,450	36,086,400	45,685,000	38,720,000	-	100,665,000	36,086,400	100	100	-	100	100.00		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	68,142,791	-	-	-	-	67,958,750	-	-	-	-	99.73		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	27,000,000	85,158,450	-	563,000,000	-	26,975,000	48,022,450	-	559,466,000	-	100	56.39	-	100	-		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	151,604,000	171,188,000	162,256,360	164,330,000	-	151,433,750	162,537,161	162,051,750	163,300,000	-	99.89	94.95	99.87	99.37	-		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	242,770,000	-	-	-	-	242,594,000	-	-	-	-	99.93		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2,021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	50,989,906	-	-	-	-	50,831,000	-	-	-	-	99.69		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	-	-	-	62,580,000	-	-	-	-	62,580,000	-	-	-	-	100.00		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	1,027,200,000	-	-	-	-	1,025,638,950	-	-	-	-	99.85		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	77,720,000	30,715,000	78,200,000	-	40,116,200	77,707,979	30,115,000	78,200,000	-	40,078,000	100.00	100.00	100.00	-	99.90		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	8,279,450	-	-	-	-	7,924,000	-	-	-	-	95.71		
Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	4,989,600	-	-	-	-	4,800,000	-	-	-	-	96.20		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-	4,989,600	-	-	-	-	4,989,500	-	-	-	-	100.00		
Koordinasi dan Penyusunan perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	4,963,000	-	-	-	-	4,954,000	-	-	-	-	99.82		
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	-	-	-	-	5,054,000	-	-	-	-	5,054,000	-	-	-	-	100.00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	9,981,800	-	-	-	-	9,981,000	-	-	-	-	99.99		
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	8,674,280,639	-	-	-	-	8,001,316,570	-	-	-	-	92.24		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	18,881,100	-	-	-	-	18,881,100	-	-	-	-	100.00		
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	6,900,000	8,900,000	18,900,000	1,500,000	-	5,900,000	8,900,000	18,900,000	1,500,000	-	100.00	100.00	100.00	100	-		
Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	-	-	30,000,000	29,842,355	-	-	-	29,998,000	29,730,500	-	-	-	99.99	99.63	-		
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Hari-Hari Besar Nasional/Daerah/Keagamaan	-	-	56,860,500	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	26.38	-	-		
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1,162,705,750	674,262,350	778,070,000	483,162,950	-	1,159,024,201	582,854,932	725,734,609	464,098,200	-							
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	55,267,750	60,727,350	-	213,162,950	-	54,302,000	44,792,400	-	199,652,200	-	98.25	73.76	-	93.66	-		
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	837,770,000	367,030,000	539,505,000	270,000,000	-	835,467,450	315,250,000	524,483,568	264,446,000	-	99.73	85.89	97.22	97.94	-		
Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani / Kelompok Tani	269,668,000	246,505,000	238,565,000	-	-	269,254,751	222,812,532	201,251,041	-	-	99.85	90.39	84.36	-	-		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	1,500,986,765	2,278,281,850	1,216,859,000	2,071,933,234	-	1,482,252,032	1,973,055,443	1,192,757,495	2,029,027,224	-							
Penanganan Daerah Rawan Pangan	50,179,000	94,564,500	-	-	-	49,955,000	83,415,100	-	-	-	99.55	88.21	-	-	-		
Penyusunan Data base potensi produksi pangan	160,077,500	361,840,000	104,034,600	77,396,234	-	146,954,500	324,014,460	103,496,420	77,246,234	-	91.80	89.55	99.48	99.81	-		
Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	196,841,000	222,595,000	147,750,000	142,380,000	-	195,907,000	199,621,250	147,664,500	142,298,300	-	99.53	89.68	99.94	99.94	-		
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	126,844,000	358,951,350	159,780,000	620,450,000	-	124,102,000	296,659,730	155,390,000	605,821,800	-	97.84	82.65	97.25	97.64	-		
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	361,429,500	172,179,000	133,675,000	83,085,000	-	361,215,319	133,905,790	123,655,000	83,038,644	-	99.94	77.77	92.50	99.94	-		
Peningkatan mutu dan keamanan pangan	160,100,000	203,336,000	202,500,000	12,350,000	-	159,463,900	166,825,500	202,168,520	12,350,000	-	99.60	82.04	99.84	100.00	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2,021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	445,515,765	864,816,000	469,119,400	1,136,272,000		444,654,313	768,613,613	460,383,055	1,108,272,246	.	99.81	88.88	98.14	97.54	.		
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	289,055,000	306,496,000	1,217,932,650	2,213,349,861	-	283,431,095	277,098,980	948,675,650	2,176,653,064	.					.		
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	202,485,000	177,085,000	1,131,971,150	2,169,664,861		197,131,000	164,953,000	863,394,150	2,133,173,064	.	97.36	93.15	76.27	98.32	.		
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna	86,570,000	129,411,000	85,961,500	43,685,000		86,300,095	112,145,980	85,281,500	43,480,000	.	99.69	86.66	99.21	99.53	.		
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	586,178,893	787,847,300	325,000,000	507,235,000	-	579,897,427	524,583,400	324,920,500	497,027,250	.					.		
Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	85,353,000	133,404,000	-	27,200,000		83,596,300	119,859,350	-	26,780,000	.	97.94	89.85	-	98.46	.		
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan	174,610,893	191,649,800	-	-		172,544,127	39,636,800	-	-	.	98.82	20.68	-	-	.		
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	326,215,000	462,793,500	325,000,000	480,035,000		323,757,000	365,087,250	324,920,500	470,247,250	.	99.25	78.89	99.98	97.96	.		
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	547,412,500	589,552,500	560,789,400	514,121,600	-	532,874,000	548,791,000	543,128,800	510,895,850	.					.		
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	547,412,500	589,552,500	560,789,400	514,121,600		532,874,000	548,791,000	543,128,800	510,895,850	.	97.34	93.09	96.85	99.37	.		
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	396,058,000	1,042,717,500	237,470,000	343,925,000	-	382,662,800	957,306,900	234,270,000	341,257,875	.					.		
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	222,710,000	272,736,000	237,470,000	197,525,000		219,100,800	252,284,400	234,270,000	194,925,000	.	98.38	92.50	98.65	98.68	.		
Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	173,348,000	769,981,500	-	146,400,000		163,562,000	705,022,500	-	146,332,875	.	94.35	91.56	-	99.95	.		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	710,034,700	1,100,516,700	799,190,600	594,300,000	-	692,885,000	997,223,649	732,100,000	590,200,000	.					.		
Pembibitan dan Perawatan Ternak	429,572,950	613,750,000	547,314,600	348,660,000		428,852,700	585,288,400	484,621,600	345,160,000	.	99.83	95.36	-	99.00	.		
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	280,461,750	347,039,650	251,876,000	245,640,000		264,032,300	287,324,699	247,478,400	245,040,000	.	94.14	82.79	-	99.76	.		
Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	-	139,727,050	-	-	-	-	124,610,550	-	-	.	-	89.18	-	-	.		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	388,680,000	528,091,000	518,300,000	363,000,000	-	386,090,000	481,142,455	508,275,000	349,800,000	.					.		
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	208,680,000	277,174,000	263,000,000	178,000,000		208,680,000	258,933,000	263,000,000	168,000,000	.	100.00	93.42	-	94.38	.		
Pengawasan Perdagangan Ternak antar daerah	180,000,000	250,917,000	255,300,000	185,000,000		177,410,000	222,209,455	245,275,000	181,800,000	.	98.56	88.56	-	98.27	.		
Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan	-	600,220,000	420,000,000	1,292,192,000	-	-	528,461,980	419,865,660	1,262,219,922	.					.		
Pembibitan Tanaman Penghijauan (Pemeliharaan Persemaian)	-	480,780,000	170,000,000	958,045,000		-	414,328,480	169,881,825	935,879,400	.		86.18	99.93	97.69	.		
Pemeliharaan (Tanaman Penghijauan Pada Lahan di Luar Kawasan Hutan)	-	119,440,000	250,000,000	334,147,000		-	114,133,500	249,983,835	326,340,522	.		95.56	99.99	97.66	.		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2,021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	-	-	640,870,000	772,445,000	-	-	-	148,752,750	769,320,750	-	-	-	23.21	99.60	-	-	-
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	-	-	980,000,000	3,678,292,500	-	-	-	943,782,192	3,053,044,163	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerapan Agroforestry (Tanaman Aren dan Tanaman Kehutanan)	-	-	980,000,000	1,302,432,500	-	-	-	943,782,192	1,292,155,663	-	-	96.30	99.21	-	-	-	-
Pengembangan Serana Prasarana Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	2,375,860,000	-	-	-	-	1,760,888,500	-	-	-	-	74.12	-	-	-
Program Penanaman Bambu Pada Kiri Kanan Sungai Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Sekitar Mata Air Daerah Imbuhan Air Tanah	-	389,705,000	450,000,000	732,425,000	-	-	385,973,502	426,707,264	712,633,300	-	-	-	-	-	-	-	-
Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)	-	389,705,000	450,000,000	732,425,000	-	-	385,973,502	426,707,264	712,633,300	-	-	99.04	94.82	97.30	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	-	-	1,843,524,458	-	-	-	-	1,680,643,453	-	-	-	-	91.16	-	-
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	-	-	-	-	546,102,000	-	-	-	-	529,569,600	-	-	-	-	96.97	-	-
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	-	-	872,243,000	-	-	-	-	861,472,834	-	-	-	-	98.77	-	-
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN																	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	-	-	-	-	289,540,500	-	-	-	-	272,253,100	-	-	-	-	94.03	-	-
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN																	
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	300,157,000	-	-	-	-	299,590,665	-	-	-	-	99.81	-	-
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-	-	-	-	111,638,807	-	-	-	-	110,695,029	-	-	-	-	99.15	-	-
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-	-	-	-	293,747,500	-	-	-	-	292,145,569	-	-	-	-	99.45	-	-
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	-	-	-	-	309,876,000	-	-	-	-	306,271,200	-	-	-	-	98.84	-	-
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	-	-	-	-	356,570,114	-	-	-	-	355,516,800	-	-	-	-	99.70	-	-
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	-	-	224,625,500	-	-	-	-	222,775,500	-	-	-	-	99.18	-	-
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	-	-	-	-	2,894,108,015	-	-	-	-	2,812,296,610	-	-	-	-	97.17	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2,021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																	
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	-	-	-	-	278,035,300	-	-	-	-	198,120,000	-	-	-	-	71.26		
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	-	-	-	-	81,716,800	-	-	-	-	73,920,000	-	-	-	-	90.46		
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-	-	-	-	174,634,950	-	-	-	-	153,987,000	-	-	-	-	88.18		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN																	
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-	-	-	-	635,461,230	-	-	-	-	624,115,960	-	-	-	-	98.21		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	-	-	-	-	428,759,828	-	-	-	-	427,735,800	-	-	-	-	99.76		
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	-	-	-	-	24,400,000	-	-	-	-	24,400,000	-	-	-	-	100.00		
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	164,250,000	-	-	-	-	164,130,000	-	-	-	-	99.93		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH																	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	32,100,000	-	-	-	-	32,100,000	-	-	-	-	100.00		
Jumlah	7,748,409,350	10,871,955,050	11,150,002,200	16,762,000,000	22,775,714,491	7,656,836,181	9,462,867,245	10,062,432,389	15,868,067,089	21,574,240,801	98.82	87.04	90.25	94.67	94.72	-	-

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyakit Hewan Menular	Masih terdapatnya kasus hewan menular zoonosis pada ternak unggulan di Kota Dumai (Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis ini tetap sama di tahun 2016, dan di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 29 kasus serta terus menurun pada tahun 2018 yaitu menjadi 23 kasus).	Ketersediaan Obat-obatan Kesehatan Hewan dan Sarana Pendukungnya masih kurang
2	Menurunnya Produksi Pertanian	a. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; b. Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; c. Tingginya ketergantungan impor pangan; d. Rendahnya kuantitas ketersediaan pangan utama belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat Kota Dumai; e. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;	Ketersediaan Pupuk dan sarana Produksi Lainnya yang mendukung peningkatan produksi masih kurang dan terbatas serta harganya cukup tinggi
3	Terbatasnya Lahan Pertanian	Tekanan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan serta mengurangi produksi;	Belum adanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
4	Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluhan Pertanian	Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian	Banyaknya SDM Penyuluh Pertanian yang purna tugas serta bertambahnya wilayah binaan
5	Masih rendahnya Ketahanan pangan masyarakat	a. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan; b. Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas; c. Belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal; d. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;	Masih tingginya ketergantungan terhadap beras sebagai makanan pokok serta masih kurangnya konsumsi makanan pokok pengganti beras

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2021-2026

Visi : “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”			
Misi : Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri (Misi I Kota Dumai)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pendapatan Petani	Meningkatnya Jumlah Kelompok Yang Dibina dan Diberi Bantuan	Menyiapkan program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan dan SDM penyuluhan pertanian - Memperkuat kelembagaan dan pembiayaan pelaku usaha sektor pertanian - Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat melalui kelompok tani dalam segala sektor pertanian
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Mensinergikan Pengembangan Kawasan Sektor Pertanian dengan Pemanfaatan lahan tidur dengan penggunaan teknologi modern	<ul style="list-style-type: none"> - Menggalakkan penggunaan bibit unggul pertanian dan perkebunan - Memfasilitasi penyediaan lahan pangan pertanian berkelanjutan - Menyediakan sarana prasarana , SDM untuk meningkatkan mutu dan produksi pertanian, perkebunan dan populasi ternak
	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular	Meningkatkan kualitas kesehatan hewan dan ternak serta produk pangan asal hewan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penanganan daerah stunting	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kemandirian pangan masyarakat - Penyediaan cadangan pangan daerah - Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pertanian lahan pekarangan

LAMPIRAN 6

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Target capaian pada akhir tahun perencanaan				
					2021		2022		2023		2024		2025				2026		
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			Kinerja	Rp.	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
Peringkatan Ketahanan Pangan Masyarakat			Penguatan Cadangan Pangan	18.10%	20.00%		22.50%	25.00%		27.50%		30.00%		32.50%		32.50%		32.50%	
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat		Angka Kecukupan Protein	52,00 Gr/Kap/Hari	52,25 Gr/Kap/Hari		52,50 Gr/Kap/Hari	52,75 Gr/Kap/Hari		53,00 Gr/Kap/Hari		53,25 Gr/Kap/Hari		53,50 Gr/Kap/Hari		53,50 Gr/Kap/Hari		53,50 Gr/Kap/Hari	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	43.62%	8.04%	3,261,869,458	8.50%	2,591,820,369	8.96%	2,515,297,480	9.64%	3,562,688,600	10.33%	3,170,000,000	10.91%	3,060,000,000	100%	18,161,675,907	
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Pengembangan Pertanian Pangan dan Hortikultura	3 Laporan	3 Laporan	1,843,524,458	3 Laporan	1,318,585,669	3 Laporan	1,839,067,480	3 Laporan	1,510,000,000	3 Laporan	1,550,000,000	3 Laporan	1,640,000,000	18 Laporan	9,701,177,607	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	3 Laporan	3 Laporan	1,843,524,458	3 Laporan	1,170,673,751	3 Laporan	1,739,068,480	3 Laporan	1,310,000,000	3 Laporan	1,350,000,000	3 Laporan	1,400,000,000	18 Laporan	8,813,266,689	
		Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Stok Pangan, Pasokan dan Harga Pangan	-	-	-	1 Laporan	147,911,918	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	147,911,918	
		Sub Kegiatan Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	150,000,000	
		Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	70,000,000	3 Unit	170,000,000	
		Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	-	-	-	-	-	120 Keluarga	99,999,000	20 Keluarga	100,000,000	20 Keluarga	100,000,000	20 Keluarga	120,000,000	60 Keluarga	419,999,000	
		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan cadangan pangan tingkat kota	1 Laporan	-	-	1 Laporan	43,398,000	1 Laporan	18,830,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	130,000,000	6 Laporan	412,228,000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Candangan Pangan Kabupaten/ Kota	laporan	-	-	12 Laporan	43,398,000	12 Laporan	18,830,000	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	120,000,000	12 Laporan	130,000,000	60 Laporan	412,228,000	
		Pengadaan Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota	Ton	10 Ton	-	-	-	-	-	-	10 Ton	150,000,000	-	-	-	30 Ton	150,000,000	
		Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/kota yang terpelihara	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/kota yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	10 Ton	50,000,000	10 Ton	50,000,000	10 Ton	50,000,000	30 Ton	150,000,000	
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	Kelompok Tani	-	-	2 Laporan	1,229,836,700	2 Laporan	657,400,000	3 Laporan	1,902,688,600	3 Laporan	1,100,000,000	3 Laporan	1,140,000,000	13 Laporan	7,398,270,300	
		Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	- Kelompok Tani	3 Kelompok Tani, 1 Laporan	546,102,000	1 Dokumen	247,590,000	1 Dokumen	11,180,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	3 Dokumen	1,104,872,000	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Kelompok; 4 Kali; 500 Orang	- Kelompok; 1 Kali; 150 Orang	872,243,000	1 Laporan	982,246,700	1 Laporan	646,220,000	1 Laporan	1,752,688,600	1 Laporan	1,000,000,000	1 Laporan	1,040,000,000	6 Laporan	6,293,398,300	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	100,000,000	4 Laporan	350,000,000	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penyediaan Sarana Pengembangan Tanaman Pekarangan pada Daerah Stunting	21.87%	0.00%	289,540,500	9.38%	103,431,200	12.30%	204,185,860							43.55%	1,047,157,560	
			Persentase Penyediaan Peta Kerawanan dan Ketahanan Pangan								100.00%	150,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	150,000,000			

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun											Target capaian pada akhir tahun perencanaan		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)							
(2)	(3)	(4)	(5)	Kinerja		Kinerja		Kinerja		Kinerja		Kinerja		Kinerja				
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Ketahanan dan Kerentanan pangan	Kelompok Tari	-	-	1 Dokumen	103,431,200	1 Dokumen	204,185,860	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	5 Dokumen	1,047,157,560
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang Dimutakhirkan	-Kelompok Tari; 1 Laporan	2 Kelompok Tari; - Laporan	289,540,500	1 Dokumen	103,431,200	1 Dokumen	204,185,860	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	6 Dokumen	1,047,157,560
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	20.00%	13.33%	300,157,000	13.33%	99,999,800	13.33%	134,570,300	13.33%	250,000,000	13.34%	250,000,000	13.34%	250,000,000	100.00%	1,284,727,100
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Laporan	300,157,000	1 Laporan	99,999,800	1 Laporan	134,570,300	2 Laporan	250,000,000	2 Laporan	250,000,000	2 Laporan	250,000,000	9 Laporan	1,284,727,100
		Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota Yang Dibina	-	4 Kali; 1 Kali	300,157,000	4 Dokumen	99,999,800	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Dokumen	400,156,800
		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan	-	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	100,000,000	20 Dokumen	300,000,000
		Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	4 Dokumen	134,570,300	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	150,000,000	20 Dokumen	584,570,300
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah (Mengikuti RPJMD)	90%	100%	12,946,323,489	100%	11,055,801,602	100%	12,449,030,446	100%	13,265,500,000	100%	13,585,500,000	100%	14,010,500,000	100%	77,312,655,537
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	10 Dokumen	78,373,650	12 Dokumen	91,690,400	12 Dokumen	152,020,048	12 Dokumen	175,000,000	12 Dokumen	205,000,000	12 Dokumen	205,000,000	73 Dokumen	907,084,098
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	9,981,800	3 Dokumen	5,000,000	-	-	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	54,981,800
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,054,000	-	-	2 Dokumen	7,145,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	52,199,000
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,963,000	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	11 Dokumen	34,963,000
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,989,600	-	-	1 Dokumen	8,272,800	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	6 Dokumen	48,262,400
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,989,600	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	6 Dokumen	34,989,600
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	40,116,200	2 Dokumen	81,690,400	2 Dokumen	120,620,000	2 Dokumen	135,000,000	2 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	100,000,000	12 Dokumen	577,426,600
		Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Laporan	8,279,450	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	15,982,248	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	6 Dokumen	104,261,698
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	90%	100%	8,693,161,739	2 Dokumen	8,126,710,341	4 Dokumen	8,663,365,660	4 Dokumen	8,710,000,000	4 Dokumen	8,850,000,000	4 Dokumen	8,900,000,000	22 Dokumen	51,943,237,740
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	8,674,280,639	68 Orang/ Bulan	8,100,550,341	68Orang/ Bulan	8,637,885,660	68 Orang/Bulan	8,680,000,000	68 Orang/Bulan	8,750,000,000	68 Orang/Bulan	8,800,000,000	340 Orang/Bulan	51,642,716,640
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	18,881,100	1 Laporan	26,160,000	1 Laporan	25,480,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	7 Laporan	300,521,100
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90%	90%	32,100,000	4 Dokumen	39,600,000	4 Dokumen	39,900,000	4 Dokumen	40,000,000	4 Dokumen	40,000,000	4 Dokumen	40,000,000	27 Dokumen	231,600,000
		Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	32,100,000	1 Laporan	39,600,000	2 Laporan	39,900,000	2 Laporan	40,000,000	2 Laporan	40,000,000	2 Laporan	40,000,000	12 Laporan	231,600,000
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	5 Dokumen	14,380,000	-	-	5 Dokumen	10,000,000	4 Dokumen	130,000,000	5 Dokumen	310,000,000	25 Dokumen	464,380,000
		Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	2 Unit	14,380,000	-	-	-	-	2Unit	20,000,000	2 Unit	20,000,000	8 Unit	54,380,000
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	2 Paket	10,000,000	-	-	2 Paket	180,000,000	4 Paket	190,000,000

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun												Target capaian pada akhir tahun perencanaan	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
		Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Orang	75,000,000	10 Orang	75,000,000	20 Orang	150,000,000
		Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Orang	35,000,000	6 Orang	35,000,000	18 Orang	70,000,000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	90%	872,818,795	7 Dokumen/ Laporan/ Paket	780,683,618	7 Dokumen/ Laporan/ Paket	1,152,706,050	7 Dokumen/ Laporan/ Paket	1,180,000,000	7 Dokumen/ Laporan/ Paket	1,200,000,000	7 Dokumen/ Laporan/ Paket	1,275,000,000	48 Dokumen/ Laporan/ Paket	6,461,208,463
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	11,973,120	4 Paket	20,877,000	4 Paket	29,996,787	4 Paket	35,000,000	4 Paket	40,000,000	4 Paket	50,000,000	20 Paket	187,846,907
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan; 3 Even	12 Bulan; - Even	198,817,848	4 Paket	78,612,000	4 Paket	118,900,463	4 Paket	120,000,000	4 Paket	130,000,000	4 Paket	150,000,000	20 Paket	796,330,311
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	12 Bulan	-	4 Paket	19,866,000	4 Paket	39,382,400	4 Paket	50,000,000	4 Paket	65,000,000	4 Paket	70,000,000	20 Paket	244,248,400	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	24 Kali	18 Kali	22,995,000	11 Paket	19,742,000	11 Paket	21,280,000	11 Paket	35,000,000	11 Paket	25,000,000	11 Paket	35,000,000	55 Paket	159,017,000
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan Yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	75,728,225	4 Paket	74,504,000	4 Paket	119,998,400	4 Paket	120,000,000	4 Paket	120,000,000	4 Paket	150,000,000	20 Paket	660,230,625
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	17,716,815	1 Dokumen	17,105,000	1 Dokumen	22,176,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	7 Dokumen	116,997,815
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	545,587,787	12 Laporan	549,977,618	12 Laporan	800,972,000	12 Laporan	800,000,000	12 Laporan	800,000,000	12 Laporan	800,000,000	60 Laporan	4,296,537,405
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37 Unit	18 Unit	1,160,629,399	15 Unit	623,586,000	21 Unit	509,643,400	23 Unit	705,500,000	25 Unit	1,025,500,000	26 Unit	1,045,500,000	165 Unit	5,070,358,799
		Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	62,000,000	-	-	1 Unit	125,208,000	1 Unit	125,500,000	1 Unit	125,500,000	1 Unit	125,500,000	4 Unit	563,708,000
		Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	17 Unit	4 Unit	132,360,000	2 Unit	55,543,000	4 Unit	160,000,000	5 Unit	200,000,000	4 Unit	150,000,000	4 Unit	150,000,000	24 Unit	847,903,000
		Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10 Unit	4 Unit	36,086,400	-	-	-	10 Unit	30,000,000	12 Unit	100,000,000	13 Unit	120,000,000	53 Unit	286,086,400	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	10 Unit	2 Unit	68,142,791	10 Unit	183,464,000	15 Unit	224,435,400	5 Unit	250,000,000	5 Unit	150,000,000	5 Unit	150,000,000	25 Unit	1,026,042,191
		Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	9 Unit	6 Unit	862,040,208	2 Unit	384,579,000	-	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	500,000,000	1 Unit	500,000,000	12 Unit	2,346,619,208
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	725,700,000	3 Laporan	838,399,045	4 Laporan	1,017,146,888	4 Laporan	1,065,000,000	4 Laporan	1,155,000,000	4 Laporan	1,155,000,000	28 Laporan	5,956,245,933
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	4,800,000	4 Laporan	4,187,500	4 Laporan	4,989,200	4 Laporan	5,000,000	4 Laporan	5,000,000	4 Laporan	5,000,000	20 Laporan	28,976,700
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	184,380,000	12 Laporan	225,491,545	12 Laporan	274,767,300	12 Laporan	280,000,000	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	60 Laporan	1,564,638,845
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	3 Laporan	130,000,000	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	15 orang; 9 Orang; 1 Orang; 1 Orang	15 orang; 9 Orang; 1 Orang; 1 Orang	536,520,000	1 Laporan	608,720,000	1 Laporan	737,390,388	1 Laporan	750,000,000	1 Laporan	800,000,000	1 Laporan	800,000,000	7 Laporan	4,232,630,388
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Unit	30 Unit	1,383,539,906	42 Unit	540,752,198	65 Unit	914,248,400	66 Unit	1,380,000,000	71 Unit	980,000,000	76 Unit	1,080,000,000	378 Unit	6,278,540,504
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	242,770,000	1 Unit	34,975,000	1 Unit	38,530,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	6 Unit	406,275,000
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	16 Unit	50,989,906	20 Unit	315,336,198	25 Unit	250,000,000	25 Unit	260,000,000	27 Unit	300,000,000	29 Unit	300,000,000	142 Unit	1,476,326,104
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	62,580,000	20 Unit	55,800,000	25 Unit	89,360,000	35 Unit	100,000,000	40 Jenis	150,000,000	45 Unit	150,000,000	170 Unit	607,740,000
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	8 Unit	1,027,200,000	1 Unit	134,641,000	5 Unit	536,358,400	3 Unit	990,000,000	3 Unit	500,000,000	3 Unit	600,000,000	25 Unit	3,788,199,400

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun												Target capaian pada akhir tahun perencanaan	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
Meningkatkan Pendapatan Petani			Pendapatan Perkapita Petani	Rp.210.300.000	Rp.223.240.000		Rp.228.820.000											
			Nilai Tukar Petani	118.77	124.71		131.79		135.08		138.46		141.92		145.47		145.47	
	Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina dan Diberi Bantuan		Cakupan Bina Kelompok Tani	128 Kelompok	149 Kelompok		165 Kelompok		170 Kelompok		175 Kelompok		180 Kelompok		185 Kelompok		1.150 Kelompok	
	Meningkatkan Produksi Pertanian		Produksi Sektor Perkebunan	84.756 Ton	85.250Ton		85.500Ton		85.750Ton		86.000 Ton		86.250 Ton		86.500 Ton		600.006 Ton	
			Produksi Sektor Pertanian	20.818 Ton	21.000 Ton		21.250 Ton		21.500 Ton		21.750 Ton		22.000 Ton		22.250 Ton		150.568 Ton	
			Populasi Ternak	6.303 Satuan Ternak	6.400 Satuan Ternak		6.600 Satuan Ternak		6.800 Satuan Ternak		7.000 Satuan Ternak		7.200 Satuan Ternak		7.400 Satuan Ternak		7.400 Satuan Ternak	
			Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lainnya	3.30 Ton/Ha	3.40 Ton/Ha		3.50 Ton/Ha		3.60 Ton/Ha		3.70 Ton/Ha		3.80 Ton/Ha		3.90 Ton/Ha		3.90 Ton/Ha	
			Jumlah Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian	8 Unit	10 Unit		12 Unit		14 Unit		16 Unit		18 Unit		20 Unit		98 Unit	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana dan Pengembangan Pertanian	41.76%	8.67%	1,296,457,921	9.09%	1,283,190,499	9.50%	3,496,525,840	9.91%	3,200,000,000	10.33%	3,540,000,000	11%	3,740,000,000	100.00%	16,556,174,260
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	85.256 Ton	85.250 Ton	111,638,807	1 Laporan	299,405,199	2 Laporan	1,961,162,480	2 Laporan	1,550,000,000	2 Laporan	1,300,000,000	2 Laporan	1,350,000,000	9 Laporan	6,572,206,486
		Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Kali; 1 Kali	2 Kali; 1 Kali	111,638,807	-	-	4 Laporan	300,000,000	4 Laporan	300,000,000	4 Laporan	300,000,000	4 Laporan	350,000,000	16 Laporan	1,361,638,807
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100 Ha; 50 Ha	-	-	4 Laporan	299,405,199	4 Laporan	1,661,162,480	4 Laporan	1,250,000,000	4 Laporan	1,000,000,000	4 Laporan	1,000,000,000	20 Laporan	5,210,567,679
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Peningkatan SDG Hewan / Tanaman	12 Bulan	12 Bulan	293,747,500	1 Dokumen	99,966,200	1 Dokumen	270,000,000	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	5 Dokumen	1,583,713,700
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	12 Bulan; - Pelatihan	12 Bulan; 2 Pelatihan	293,747,500	1 Dokumen	99,966,200	1 Dokumen	270,000,000	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	5 Dokumen	1,583,713,700
		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan Pakan / pakan / Tanaman Skala Kecil	-	-	-	-	-	12 Laporan	139,629,300	12 Laporan	580,000,000	12 Laporan	350,000,000	12 Laporan	350,000,000	48 Laporan	1,419,629,300
		Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan Pakan / pakan / Tanaman Skala Kecil	Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan Pakan / pakan / Tanaman Skala Kecil	-	-	-	-	-	12 Laporan	139,629,300	12 Laporan	580,000,000	12 Laporan	350,000,000	12 Laporan	350,000,000	48 Laporan	1,419,629,300
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.300 Satuan Ternak	6.400 Satuan Ternak	666,446,114	2 Laporan	883,819,100	2 Laporan	723,680,860	2 Laporan	450,000,000	2 Laporan	790,000,000	2 Laporan	840,000,000	10 Laporan	4,353,946,074
		Sub Kegiatan : Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan	1 Laporan	309,876,000	1 Laporan	543,903,700	1 Laporan	446,609,760	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	420,000,000	1 Laporan	450,000,000	7 Laporan	2,420,389,460
		Sub Kegiatan : Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	356,570,114	1 Laporan	339,915,400	1 Laporan	277,071,100	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	370,000,000	1 Laporan	390,000,000	7 Laporan	1,933,556,614
		Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Untuk Masyarakat	- Ekor; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan	- Ekor; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan	224,625,500	-	-	20 Ekor	402,053,200	20 Ekor	500,000,000	20 Ekor	700,000,000	40 Ekor	800,000,000	120 ekor	2,626,678,700
		Sub Kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	- Ekor; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan	- Ekor; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan	224,625,500	-	-	20 Ekor	402,053,200	20Ekor	500,000,000	20 Ekor	700,000,000	40 Ekor	800,000,000	120 Ekor	2,626,678,700
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan prasarana pertanian	25.95%	10.75%	2,894,108,015	12.66%	1,403,331,600	12.66%	1,712,104,900	12.66%	1,865,000,000	12.66%	2,100,000,000	12.66%	2,160,000,000	100.00%	12,134,544,515
		Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen Persiapan dan Pengelolaan LP2B	-	-	-	1 Dokumen	99,900,000	-	-	4 Dokumen	105,000,000	4 Dokumen	140,000,000	4 Dokumen	140,000,000	17 Dokumen	484,900,000

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun												Target capaian pada akhir tahun perencanaan	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B Yang Dikelola	-	-	-	1 Dokumen	99,900,000	-	-	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	5 Dokumen	219,900,000
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	5 Dokumen	265,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya								1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	3 Laporan	90,000,000
		Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian								1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	90,000,000
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun dan Diadakan	14 Unit; 7 Unit; 5 Unit	10 Unit; 2 Unit; 5 Unit	2,894,108,015	20 Unit	1,303,431,600	20 Unit	1,712,104,900	20 Unit	1,600,000,000	20 Unit	1,800,000,000	20 Unit	1,860,000,000	139 Unit	11,169,644,515
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Yang Dibangun, dan Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang Dibangun, dan Direhabilitasi dan Dipelihara	14 Unit; 5 Unit; 2 Unit; 5 Unit	10 Unit; - Unit; 2 Unit; 5 Unit	2,894,108,015	20 Unit	1,303,431,600	22 Unit	1,712,104,900	24 Unit	1,600,000,000	26 Unit	1,800,000,000	28 Unit	1,860,000,000	139 Unit	11,169,644,515
		Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas penataan prasarana pertanian								50 Ha	100,000,000	50 Ha	100,000,000	50 Ha	100,000,000	150 Ha	300,000,000
		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan								50 Ha	100,000,000	50 Ha	100,000,000	50 Ha	100,000,000	150 Ha	300,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	40%	10%	635,461,230	10%	640,522,900	10%	781,159,800	10%	800,000,000	10%	800,000,000	10%	800,000,000	100.00%	4,457,143,930
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	15 Kali	15 Kali	635,461,230	55 Ha	640,522,900	60 Ha	781,159,800	65 Ha	800,000,000	70 Ha	800,000,000	75 Ha	800,000,000	325 Ha	4,457,143,930
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	15 Kali; 35 Orang	15 Kali; 35 Orang	635,461,230	55 Ha	640,522,900	60 Ha	781,159,800	65 Ha	800,000,000	70 Ha	800,000,000	75 Ha	800,000,000	325 Ha	4,457,143,930
																	325	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular	84.21%	3.90%	534,387,050	3.39%	721,873,666	2.89%	1,417,298,666	2.38%	1,150,000,000	1.87%	1,000,000,000	1.36%	1,100,000,000	100.00%	5,923,559,382
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis dan Non Zoonosis	27 Kasus	15 Kasus	278,035,300	13 Kasus	230,166,016	11 Kasus	216,853,440	9 Kasus	280,000,000	7 Kasus	250,000,000	5 Kasus	300,000,000	5 Kasus	1,555,054,756
		Sub Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Bulan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan	12 Bulan; 1 Kegiatan; 1 Kegiatan	278,035,300	12 Laporan	230,166,016	12 Laporan	216,853,440	12 Laporan	280,000,000	12 Laporan	250,000,000	12 Laporan	300,000,000	60 Laporan	1,555,054,756
		Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	81,716,800	12 Laporan	126,105,000	12 Laporan	92,438,640	12 Laporan	250,000,000	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	320,000,000	72 Laporan	1,170,260,440
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan / Atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12 Bulan; 4 Orang	12 Bulan; 4 Orang	81,716,800	12 Laporan	126,105,000	12 Laporan	92,438,640	12 Laporan	250,000,000	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	320,000,000	60 Laporan	1,170,260,440
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laborotium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan jasa Laborotium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kabupaten / kota	-	-	-	12 laporan	189,956,750	12 laporan	855,998,500	12 laporan	320,000,000	12 laporan	250,000,000	12 laporan	250,000,000	60 laporan	1,865,955,250
		Penyediaan Pelayanan jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	-	-	12 Laporan	189,956,750	12 Laporan	855,998,500	12 Laporan	320,000,000	12 Laporan	250,000,000	12 Laporan	250,000,000	60 Laporan	1,865,955,250
		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	9 Kasus;	8 Kasus;	174,634,950	12 Laporan	175,645,900	12 Laporan	192,009,286	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	230,000,000	60 Laporan	1,272,290,136
		Sub Kegiatan : Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Kali; 12 Bulan	1 Kali; 12 Bulan	174,634,950	12 Laporan	175,645,900	12 Laporan	192,009,286	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	230,000,000	60 Laporan	1,172,290,136
		Sub Kegiatan : Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi								1 Unit	100,000,000					1 Unit	100,000,000
		Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan	Terlaksananya operasional RPH	-	-	-	-	-	12 Bulan	59,998,800	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	59,998,800

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun												Target capaian pada akhir tahun perencanaan	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
		Sub Kegiatan : Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan hewan	Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	-	-	-	-	12 Laporan	59,998,800	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	59,998,800
		Sub Kegiatan : Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan									1 Unit	100,000,000	1 Unit	200,000,000	2 Unit	300,000,000	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	30.24%	10.14%	617,409,828	11.23%	427,308,826	11.58%	1,617,765,520	11.93%	1,450,071,369	12.27%	1,377,590,333	12.61%	1,602,590,333	100.00%	7,092,736,209
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan dan Sarana Penyuluhan Yang Dibina	149 Kelompok	149 Kelompok	617,409,828	6 Unit	427,308,826	49 Unit	1,617,765,520	55 Unit	1,450,071,369	60 Unit	1,377,590,333	66 Unit	1,602,590,333	274 Unit	7,092,736,209
		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Pelatihan; 1 kali	2 Pelatihan	428,759,828	6 Unit	427,308,826	6 Unit	629,755,520	6 Unit	550,071,369	6 Unit	498,590,333	6 Unit	502,590,333	30 Unit	3,037,076,209
		Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Pelatihan	2 Pelatihan	24,400,000	-	-	35 Unit	810,181,800	40 Unit	500,000,000	45 Unit	509,000,000	50 Unit	500,000,000	200 Unit	2,343,581,800
		Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-	5 Jeni	164,250,000	-	-	1 Unit	125,334,100	2 Unit	150,000,000	2 Unit	140,000,000	3 Unit	200,000,000	9 Unit	779,584,100
		Sub Kegiatan : Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	-	-	-	-	-	1 Unit	12,556,500	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	200,000,000	5 Unit	412,556,500
		Sub Kegiatan : Pembentukan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kab/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani Yang Terbentuk dan Beroperasi	-	-	-	-	-	6 Unit	39,937,600	6 Unit	150,000,000	6 Unit	130,000,000	6 Unit	200,000,000	30 Unit	519,937,600
		JUMLAH				22,775,714,491		18,327,280,462		24,327,938,812		25,693,259,969		26,073,090,333		27,073,090,333		144,270,374,400